

**DINAMIKA POLITIK LUAR NEGERI DAN KETERGANTUNGAN
DALAM PENGADAAN ALUTSISTA PESAWAT TEMPUR ANGKATAN
UDARA REPUBLIK INDONESIA (1970-1992)**



Intelligentia - Dignitas

Iltsar Ahmad Ibrahim

1403622076

Skripsi yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Pendidikan

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2026

ABSTRAK

Iltsar Ahmad Ibrahim. *Dinamika Politik Luar Negeri dan Ketergantungan dalam Pengadaan Alutsista Pesawat Tempur Angkatan Udara Republik Indonesia 1970-1992*. **Skripsi**. Jakarta: Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta, 2026.

Penelitian ini membahas dinamika politik luar negeri dan ketergantungan dalam pengadaan alutsista pesawat tempur Angkatan Udara Republik Indonesia pada periode 1970-1992. Fokus penelitian diarahkan pada pengaruh perubahan orientasi politik luar negeri Indonesia pasca-1965 terhadap arah pengadaan pesawat tempur serta munculnya ketergantungan terhadap negara-negara maju dalam aspek teknologi, logistik, dan politik pertahanan. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang meliputi tahapan pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Sumber yang digunakan terdiri atas dokumen resmi TNI, arsip kebijakan pertahanan, publikasi resmi, buku sejarah militer, serta literatur akademik. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori dinamika persenjataan Barry Buzan dan Eric Herring serta teori ketergantungan Andre Gunder Frank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan pesawat tempur pada masa Orde Baru merupakan bentuk adaptasi strategis terhadap perubahan geopolitik Perang Dingin dan kebutuhan pemulihan kekuatan udara nasional. Pergeseran dari ketergantungan pada Uni Soviet menuju kerja sama dengan negara-negara Barat tampak dalam pengadaan F-86 Sabre, T-33 Bird, OV-10 Bronco, F-5 E/F Tiger II, A-4 Skyhawk, Hawk Mk-53, dan F-16 Fighting Falcon. Namun, modernisasi tersebut tidak sepenuhnya menghasilkan kemandirian pertahanan karena Indonesia tetap bergantung pada negara pemasok dalam suku cadang, pelatihan, pemeliharaan, transfer teknologi, dan hubungan diplomatik. Embargo militer setelah peristiwa Santa Cruz memperlihatkan kerentanan tersebut dan menegaskan bahwa modernisasi alutsista berkaitan erat dengan relasi politik internasional Indonesia kontemporer.

Kata Kunci: Kebijakan pengadaan pesawat tempur, Angkatan Udara Republik Indonesia, Orde Baru, ketergantungan.

ABSTRACT

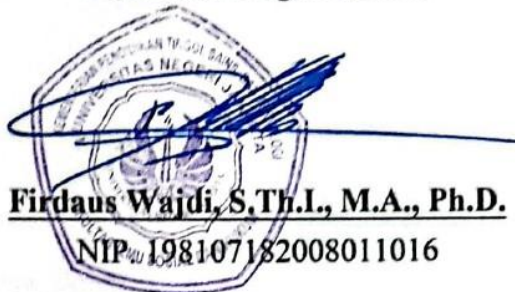
Iltsar Ahmad Ibrahim. *Foreign Policy Dynamics and Dependency in the Procurement of Combat Aircraft for the Indonesian Air Force 1970-1992*. **Thesis**. Jakarta: History Education Program, Faculty of Social Sciences and Law, Jakarta State University, 2026.

This study examines the foreign policy dynamics and dependencies in the procurement of fighter aircraft for the Indonesian Air Force during the period 1970-1992. The research focuses on the influence of changes in Indonesia's foreign policy orientation after 1965 on the direction of fighter aircraft procurement, as well as the emergence of dependencies on developed nations in the areas of technology, logistics, and defense policy. This study employs a historical methodology encompassing the stages of topic selection, heuristics, verification, interpretation, and historiography. The sources used consist of official TNI documents, defense policy archives, official publications, military history books, and academic literature. The analysis was conducted using Barry Buzan and Eric Herring's arms race theory and Andre Gunder Frank's dependency theory. The research findings indicate that fighter aircraft procurement during the New Order era constituted a strategic adaptation to the geopolitical shifts of the Cold War and the need to rebuild national air power. The shift from dependence on the Soviet Union toward cooperation with Western nations is evident in the procurement of the F-86 Sabre, T-33 Bird, OV-10 Bronco, F-5 E/F Tiger II, A-4 Skyhawk, Hawk Mk-53, and F-16 Fighting Falcon. However, this modernization did not fully result in defense self-reliance, as Indonesia remained dependent on supplier nations for spare parts, training, maintenance, technology transfer, and diplomatic relations. The military embargo following the Santa Cruz incident highlighted this vulnerability and underscored that the modernization of defense equipment is closely tied to Indonesia's contemporary international political relations.

Keywords: Fighter aircraft procurement policy, Indonesian Air Force, New Order, dependence.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Penanggung Jawab/Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Jakarta



No.	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1.	<u>Dr. Nur Aeni Marta, S.S., M.Hum.</u> NIP. 197109222001122001 Ketua		2 Juli 2026
2.	<u>Dr. Djunaidi, M.Hum.</u> NIP. 196511281991031003 Penguji Ahli I		11 Juli 2026
3.	<u>Diki Tri Apriansyah Putra, S.Pd., M.Hum.</u> NIP. 199704192024061001 Penguji Ahli II		8 Juli 2026
4.	<u>Dr. Abrar, M.Hum.</u> NIP. 196110281987031004 Pembimbing I		2 Juli 2026
5.	<u>Humaidi, M.Hum.</u> NIP. 198112192008121001 Pembimbing II		13 Juli 2026

Tanggal Lulus: 03 Agustus 2026

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta:

Nama : Iltsar Ahmad Ibrahim

NIM : 1403622076

Program Studi : S1 Pendidikan Sejarah

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "DINAMIKA POLITIK LUAR NEGERI DAN KETERGANTUNGAN DALAM PENGADAAN ALUTSISTA PESAWAT TEMPUR ANGKATAN UDARA REPUBLIK INDONESIA (1970-1992)" adalah:

1. Skripsi ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (ahli madya, sarjana, magister, dan/atau doctor) baik di Universitas Negeri Jakarta maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni hasil gagasan dan rumusan penelitian saya sendiri. Tanpa bantuan dari orang lain, kecuali bimbingan dan arahan dari Dosen Pembimbing.
3. Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis maupun dipublikasikan ke orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai sitasi dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala sanksi akademik sesuai dengan yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta.

Jakarta, 6 Juli 2026



Iltsar Ahmad Ibrahim



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
UPT PERPUSTAKAAN
Jalan Rawamangun Muka Jakarta 13220
Telepon/Faksimili: (021) 4894221
Laman: lib.unj.ac.id.

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Iltsar Ahmad Ibrahim
NIM : 1403622076
Fakultas/Prodi : Ilmu Sosial dan Hukum/S1 Pendidikan Sejarah
Alamat Surel : iltsara51@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas Karya Ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-Lain (.....)

yang berjudul: **DINAMIKA POLITIK LUAR NEGERI DAN KETERGANTUNGAN DALAM PENGADAAN ALUTSISTA PESAWAT TEMPUR ANGKATAN UDARA REPUBLIK INDONESIA (1970-1992)**

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmediakan, dan mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 6 Juli 2026

Iltsar Ahmad Ibrahim

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

“Bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya,”

(Q.S An-Najm: 39)

“Kuasai Udara untuk Melaksanakan Kehendak Nasional, Karena Kekuatan Nasional di Udara adalah Faktor yang Menentukan dalam Perang Modern.”

Ir. Soekarno

“Robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasadku ini, tetapi jiwaku yang dilindungi benteng Merah Putih akan tetap hidup, tetap menuntut bela, siapapun lawan yang kuhadapi.”

Jenderal Besar TNI (Anumerta) Soedirman

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dukungan, dan pengorbanan tanpa henti dalam setiap langkah hidup saya. Kepada keluarga, serta teman-teman seperjuangan yang telah memberikan bantuan, arahan, dan semangat selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga karya ini menjadi bentuk kecil dari rasa syukur dan terima kasih saya kepada semua pihak yang telah mendukung perjalanan akademik saya.

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, karunia, kekuatan, dan kemudahan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Dinamika Politik Luar Negeri dan Ketergantungan dalam Pengadaan Alutsista Pesawat Tempur Angkatan Udara Republik Indonesia 1970-1992”. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam, yang menjadi teladan dalam ilmu, akhlak, dan kehidupan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta. Dalam proses penyusunannya, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa doa, bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Secara khusus, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, doa, serta bantuan secara langsung maupun tidak langsung selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan sebagai bentuk penghargaan atas segala perhatian, kesabaran, dan kontribusi yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Firdaus Wajdi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta, serta Ibu Dr. Nur'aeni Marta, S.S., M.Hum., selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh dosen Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta, yang telah memberikan ilmu, bimbingan, pengalaman, serta nilai-nilai akademik selama masa perkuliahan. Segala ilmu dan pembelajaran yang diberikan menjadi bekal penting bagi penulis dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini.

Secara khusus, penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Abrar, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, arahan, kritik, dan masukan yang sangat berarti selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Humaidi, S.Pd., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, arahan, kritik, dan saran selama proses penyusunan skripsi ini. Kesabaran, ketelitian, serta perhatian dari kedua dosen pembimbing telah membantu penulis dalam memperbaiki isi, struktur, dan ketajaman analisis penelitian.

Penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada kedua orang tua, Bapak Bambang dan Ibu Martiana, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan moral maupun material, serta menjadi sumber kekuatan terbesar bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan dan penyusunan skripsi ini. Segala pengorbanan, nasihat, dan ketulusan yang diberikan menjadi motivasi utama bagi penulis untuk menyelesaikan karya ini dengan sebaik-baiknya. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada saudara penulis, Sadidan, yang telah memberikan dukungan, semangat, dan doa selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kota Bogor beserta jajarannya yang telah memberikan dukungan melalui program beasiswa kepada penulis. Bantuan tersebut menjadi motivasi dan dukungan penting bagi penulis dalam menempuh pendidikan hingga menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih turut penulis sampaikan kepada Pusat Sejarah Tentara Nasional Indonesia, khususnya Kepala Pusat Sejarah Tentara Nasional Indonesia beserta jajarannya, serta Dinas Sejarah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, khususnya Kepala Dinas Sejarah beserta jajarannya, yang telah memberikan kesempatan, bantuan, dan akses kepada penulis untuk memperoleh sumber-sumber yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada teman-teman SMP penulis, Aufryanto, Dimas, dan Zikri, yang telah memberikan dukungan, semangat, serta kebersamaan sejak masa sekolah hingga masa penyusunan skripsi ini. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada teman-teman SMA penulis di Brain Kuli Academy, yaitu Koang, Tuple, Bekap, dan Vedro, yang telah memberikan dukungan, semangat, serta kebersamaan yang berarti sejak masa SMA hingga tahap penyusunan skripsi. Penulis juga berterima kasih kepada teman-teman kuliah dalam grup “Lulus Bareng Ya”, yaitu Obet, Ivander, Abdul, Fira, Farka, Wed, Gontar, Karina, Rizky, Jeni, dan Fajar Arina, yang telah memberikan dukungan, semangat, kebersamaan, serta menjadi teman berproses selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Kak Hanum, selaku kakak tingkat penulis, yang telah memberikan dukungan, arahan, semangat, serta banyak nasihat berharga selama penulis menempuh perkuliahan. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada teman-teman Departemen Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa BEMP Pendidikan Sejarah 2024, yaitu Shaumi, Farka, Wed, Dinia, Jelita, Wawa, Aira, Hafiz, dan Huda, yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis selama menjalankan amanah di departemen.

Terima kasih juga penulis sampaikan secara khusus kepada Aira, selaku adik tingkat penulis, yang telah memberikan dukungan, semangat, dan kebersamaan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Kehadirannya menjadi bagian yang berkesan dalam perjalanan akademik penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi yang berjudul “Dinamika Politik Luar Negeri dan Ketergantungan dalam Pengadaan Alutsista Pesawat Tempur Angkatan Udara Republik Indonesia 1970-1992” ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan terbuka menerima kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ini. Semoga segala doa, bantuan, dukungan, dan kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta’ala. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya dalam pengembangan kajian sejarah militer Indonesia dan kebijakan pengadaan alutsista udara pada masa Orde Baru.

Bogor, 21 Mei 2026



Iltsar Ahmad Ibrahim

DAFTAR ISTILAH

<i>Adaptive arms behavior</i>	: Respons negara dalam menyesuaikan kuantitas dan kualitas alutsista terhadap perubahan lingkungan strategis dan teknologi.
<i>Action-reaction model</i>	: Model dalam dinamika persenjataan yang menjelaskan peningkatan kekuatan militer suatu negara sebagai respons terhadap ancaman dari negara lain.
<i>Advanced trainer</i>	: Pesawat latih tingkat lanjut yang menjembatani pendidikan dasar penerbang menuju pengoperasian pesawat tempur operasional.
<i>Agreed Minutes 1970</i>	: Perjanjian restrukturisasi utang multilateral antara Indonesia dan Paris Club pada 24 April 1970.
<i>Apropriasi</i>	: Proses penguasaan dan pemanfaatan surplus ekonomi oleh pihak dominan untuk kepentingan akumulasi dan pengembangan dirinya.
<i>Arming/de-arming area</i>	: Area khusus untuk pemasangan dan pembongkaran senjata pada pesawat tempur sebelum atau sesudah misi.
<i>Arms racing</i>	: Persaingan antarnegara dalam meningkatkan jumlah, kualitas, dan kecanggihan persenjataan untuk mencapai keunggulan strategis.
<i>Balance of power</i>	: Konsep keseimbangan kekuatan agar tidak ada satu negara yang terlalu dominan dan mampu mengancam negara lain.
<i>Chamber flight</i>	: Pelatihan fisiologi penerbangan dalam ruang simulasi tekanan rendah untuk mengenali dampak ketinggian terhadap tubuh penerbang.
<i>Collective Defence Agreement in South East Asia</i>	: Perjanjian pertahanan kolektif di Asia Tenggara untuk menghadapi ancaman militer, terutama dalam konteks Perang Dingin.

	Strategi pembendungan Amerika Serikat untuk
<i>Containment strategy</i>	: mencegah penyebaran komunisme dan pengaruh Uni Soviet.
	Konsep yang menjelaskan bahwa perubahan bentuk
<i>Continuity in change</i>	: atau aktor tidak selalu mengubah struktur dasar ketergantungan.
	Fitur keselamatan fisik di bandara untuk mencegah
<i>Crash barrier</i>	: kendaraan memasuki area terlarang seperti landasan pacu atau <i>taxiway</i> .
	Strategi pertahanan yang bersifat melindungi
Defensif aktif	: kedaulatan negara, tetapi tetap proaktif dalam mendeteksi dan mencegah ancaman.
	Tindakan strategis yang melemahkan stabilitas politik,
<i>Destabilizing</i>	: keamanan, atau kedaulatan suatu negara maupun kawasan.
	Efek pencegahan melalui kekuatan atau ancaman yang
<i>Deterrence effect</i>	: membuat lawan enggan menyerang karena risiko pembalasan.
	Sistem pengatusan air untuk mencegah genangan di
<i>Drainage</i>	: landasan pacu, <i>taxiway</i> , dan <i>apron</i> .
	Proses pengambilan atau penghisapan surplus
Ekspropriasi	: ekonomi oleh pihak yang lebih kuat dari pihak yang lebih lemah.
	Fasilitas khusus untuk menguji kinerja mesin pesawat
<i>Engine test cell</i>	: setelah pemeliharaan atau perbaikan tanpa menerbangkan pesawat.
	Penerbangan pemindahan pesawat dari satu lokasi ke
<i>Ferry flight</i>	: lokasi lain tanpa membawa penumpang atau kargo komersial.
	Ketentuan bantuan Amerika Serikat yang mewajibkan
Formula 1/3	: sekitar sepertiga dana digunakan untuk membeli barang atau jasa dari Amerika Serikat.

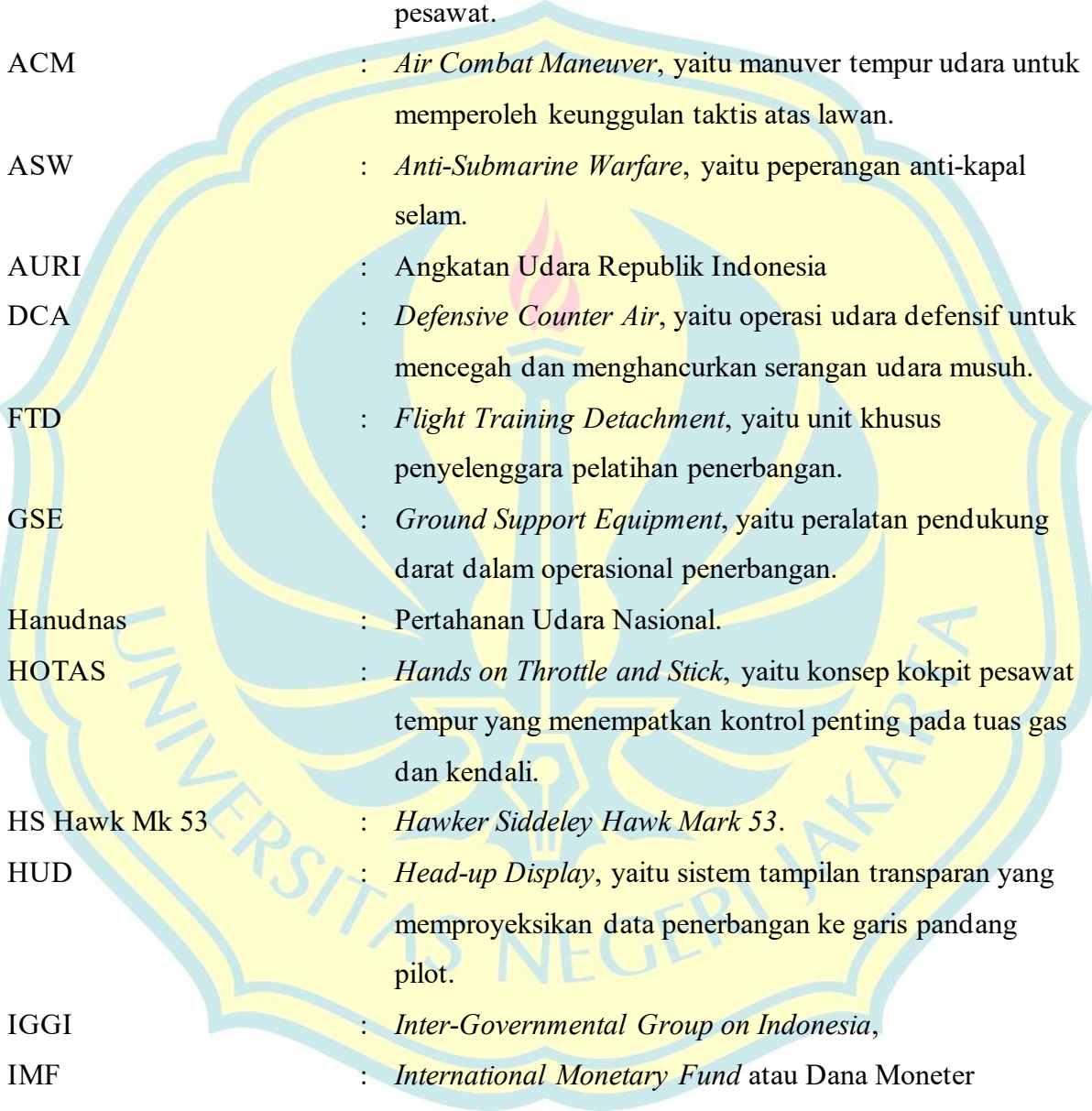
<i>General flying</i>	:	Operasi penerbangan sipil selain penerbangan berjadwal dan operasi militer.
<i>Ground attack</i>	:	Operasi udara untuk menyerang sasaran di darat atau permukaan laut.
<i>Ground school</i>	:	Tahap pendidikan teori penerbangan sebelum latihan terbang.
<i>Home base</i>	:	Pangkalan utama tempat pesawat bermarkas, dirawat, dan dioperasikan secara rutin.
Kondisi <i>grounded</i>	:	Keadaan ketika pesawat tidak diizinkan terbang akibat tidak layak operasional, misalnya karena kekurangan suku cadang.
<i>Low profile policy</i>	:	Kebijakan atau pendekatan diplomasi yang tidak menonjolkan diri dan menghindari perhatian berlebih.
<i>Maritime reconnaissance</i>	:	Kegiatan pengintaian dan pengawasan wilayah maritim untuk memperoleh informasi keamanan perairan.
Mesin <i>turboprop</i>	:	Mesin pesawat berbasis turbin gas yang menggerakkan baling-baling melalui <i>gearbox</i> .
<i>Metropolis-satellite</i>	:	Struktur hubungan timpang ketika negara maju mendominasi negara berkembang melalui ekonomi, teknologi, dan sumber daya
<i>Minimum essential capability</i>	:	Tingkat kemampuan militer minimum yang dianggap cukup untuk menjamin pertahanan nasional.
Misi <i>strike</i>	:	Operasi udara ofensif untuk menghancurkan, menetralsir, atau menunda kemampuan militer lawan.
<i>Modernisation of Avionics Capabilities for Armament and Navigation</i>	:	Proses peningkatan sistem avionik pesawat, terutama pada aspek persenjataan dan navigasi.
<i>Observer</i> pada pesawat	:	Awak atau personel yang bertugas memantau situasi, mengoperasikan sensor, melakukan pemetaan, dan membantu navigasi.

Operasi udara ofensif	: Operasi militer udara untuk menyerang dan menghancurkan kekuatan musuh di darat, laut, maupun udara.
<i>Overrun</i>	: Kondisi ketika pesawat melewati batas ujung landasan pacu saat mendarat atau membatalkan lepas landas.
<i>Overlay</i>	: Proses pelapisan ulang permukaan landasan pacu, <i>taxiway</i> , atau <i>apron</i> .
<i>Paris Meeting</i>	: Pertemuan antara Indonesia dan negara-negara kreditur Barat pada Desember 1966 untuk membahas penjadwalan ulang utang luar negeri.
Pesawat tempur <i>multirole</i>	: Pesawat tempur serbaguna yang mampu menjalankan berbagai misi, seperti superioritas udara, serangan darat, dan pengintaian.
<i>Platform</i> hanggar	: Area lantai atau <i>apron</i> yang diperkeras untuk parkir, pergerakan, dan perawatan pesawat.
<i>Political leverage</i>	: Kemampuan menggunakan posisi, hubungan, informasi, atau sumber daya untuk memengaruhi keputusan politik.
<i>Power Check Area</i>	: Area khusus untuk menguji daya mesin pesawat dari tingkat rendah hingga maksimal.
<i>Runway</i>	: Landasan pacu yang digunakan untuk pendaratan dan lepas landas pesawat.
<i>Runway marking</i>	: Tanda berupa garis, simbol, atau angka di landasan pacu sebagai alat bantu visual bagi pilot.
Rudal <i>air-to-air</i>	: Peluru kendali yang ditembakkan dari pesawat untuk menghancurkan sasaran udara.
Rudal <i>air-to-ground</i>	: Peluru kendali yang diluncurkan dari pesawat untuk menghancurkan sasaran di darat atau permukaan laut.
<i>Security dilemma</i>	: Situasi ketika upaya suatu negara memperkuat keamanan justru membuat negara lain merasa terancam.
<i>Shoulder</i>	: Area perkerasan di sisi kanan dan kiri landasan pacu.

Sistem avionik	: Komponen elektronik terintegrasi pada pesawat, mencakup navigasi, komunikasi, kontrol penerbangan, dan radar.
Sistem pemeliharaan	: Kegiatan teknis dan administratif untuk memastikan pesawat tetap layak terbang, aman, dan siap tempur.
Skadron	: Satuan udara yang terdiri atas sejumlah pesawat, awak, dan personel pendukung.
Subordinat	: Posisi hierarkis yang menunjukkan ketergantungan atau kedudukan lebih rendah terhadap aktor dominan.
<i>Swing Compass Area</i>	: Area khusus untuk mengkalibrasi kompas magnetik pada pesawat.
<i>Tokyo Meeting</i>	: Pertemuan tahun 1966 untuk merestrukturisasi utang luar negeri Indonesia pada awal Orde Baru.
<i>Upgrading</i> pesawat tempur	: Proses modernisasi avionik, struktur, mesin, dan persenjataan pada pesawat tempur agar tetap relevan secara operasional.



DAFTAR SINGKATAN



ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
A.G.E	: <i>Aircraft Ground Equipment</i> , yaitu peralatan pendukung darat untuk menyiapkan, memeriksa, dan merawat pesawat.
ACM	: <i>Air Combat Maneuver</i> , yaitu manuver tempur udara untuk memperoleh keunggulan taktis atas lawan.
ASW	: <i>Anti-Submarine Warfare</i> , yaitu peperangan anti-kapal selam.
AURI	: Angkatan Udara Republik Indonesia
DCA	: <i>Defensive Counter Air</i> , yaitu operasi udara defensif untuk mencegah dan menghancurkan serangan udara musuh.
FTD	: <i>Flight Training Detachment</i> , yaitu unit khusus penyelenggara pelatihan penerbangan.
GSE	: <i>Ground Support Equipment</i> , yaitu peralatan pendukung darat dalam operasional penerbangan.
Hanudnas	: Pertahanan Udara Nasional.
HOTAS	: <i>Hands on Throttle and Stick</i> , yaitu konsep kokpit pesawat tempur yang menempatkan kontrol penting pada tuas gas dan kendali.
HS Hawk Mk 53	: <i>Hawker Siddeley Hawk Mark 53</i> .
HUD	: <i>Head-up Display</i> , yaitu sistem tampilan transparan yang memproyeksikan data penerbangan ke garis pandang pilot.
IGGI	: <i>Inter-Governmental Group on Indonesia</i> ,
IMF	: <i>International Monetary Fund</i> atau Dana Moneter Internasional.
INS	: <i>Inertial Navigation System</i> , yaitu sistem navigasi inersia.
lbs/lbf	: <i>Pounds</i> atau <i>pounds-force</i> , yaitu satuan daya dorong mesin pesawat.



MENHANKAM/PANGAB	: Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata.
ML	: <i>Militaire Luchtvaart</i> , yaitu sayap udara Tentara Kerajaan Hindia Belanda.
MLD	: <i>Marine Luchtvaartdienst</i> , yaitu dinas penerbangan Angkatan Laut Kerajaan Belanda.
MSCADC	: <i>Miniature Standard Central Air Data Computer</i> , yaitu instrumen avionik untuk menghitung data penerbangan secara real-time.
NDI	: <i>Non-Destructive Inspection</i> , yaitu inspeksi teknis tanpa merusak komponen pesawat.
OECD	: <i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i> , yaitu Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi.
PMEL	: <i>Precision Measurement Electronic Laboratory</i> , yaitu fasilitas kalibrasi dan perbaikan peralatan ukur elektronik.
QFI	: <i>Qualified Flying Instructor</i> , yaitu pendidikan untuk melatih pilot militer menjadi instruktur penerbangan.
RWR	: <i>Radar Warning Receiver</i> , yaitu perangkat peringatan radar pada pesawat militer.
SABCA	: <i>Société Anonyme Belge de Constructions Aéronautiques</i> , yaitu perusahaan kedirgantaraan Belgia.
SEATO	: <i>Southeast Asia Treaty Organization</i> , yaitu organisasi pakta pertahanan Asia Tenggara pada masa Perang Dingin.
SOAP	: <i>Spectrometric Oil Analysis Program</i> , yaitu program analisis oli untuk pemeliharaan preventif mesin pesawat.
TMDE	: <i>Test, Measurement, and Diagnostic Equipment</i> , yaitu peralatan pengujian, pengukuran, dan diagnostik.
VC	: <i>Việt Cộng</i> , yaitu pasukan gerilya komunis di Vietnam Selatan pada masa Perang Vietnam.
VVC	: <i>Vrijwillig Vliegers Corps</i> , yaitu korps penerbang sukarela pada masa Hindia Belanda.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
PRAKATA	vii
DAFTAR ISTILAH.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Dasar Pemikiran	1
1.2 Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan.....	6
1.4 Kerangka Analisis	7
1.5 Metode dan Bahan Sumber	10
BAB II PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN ADAPTASI KEBIJAKAN PENGADAAN PESAWAT TEMPUR 1970-1992.....	15
2.1 Transisi dari Ketergantungan Soviet	16
2.2 Modernisasi Alutsista Udara Berbasis Barat	26
2.3 Peran Diplomasi Amerika Serikat dalam Kebijakan Pengadaan Pesawat Tempur	62

2.4 Kerja Sama Indonesia-Australia dan Adaptasi Awal terhadap Sistem Persenjataan Barat	71
2.5 Capaian Modernisasi Kekuatan Udara AURI 1970-1992	77
BAB III STRUKTUR KETERGANTUNGAN INDONESIA TERHADAP NEGARA-NEGARA BARAT DALAM TEKNOLOGI, SISTEM PELATIHAN DAN HUBUNGAN DIPLOMATIK PADA PENGADAAN ALUTSISTA UDARA.....	81
3.1 Ketergantungan terhadap Suku Cadang dan Dukungan Logistik	82
3.2 Model Pelatihan dan Transfer Pengetahuan dalam Pengoperasian Alutsista Udara	92
3.3 Ketergantungan Diplomatik, Tekanan Politik, dan Dampak Embargo Militer	98
3.4 Embargo Militer dan Krisis Ketergantungan Alutsista Udara 1991-1992	105
BAB IV KESIMPULAN.....	110
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN.....	115
RIWAYAT HIDUP	175



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pesawat DH-115 Indonesia	17
Gambar 2.2 MiG-17 Indonesia	19
Gambar 2.3 MiG-21 Indonesia	20
Gambar 2.4 F-86 Sabre sampai ke Indonesia	28
Gambar 2.5 Suasana kesibukan persiapan penyambutan F-86 Sabre	29
Gambar 2.6 Pesawat T-33 Bird Indonesia.....	31
Gambar 2.7 Kedatangan Pesawat T-33 Bird di Indonesia	32
Gambar 2.8 Pesawat OV-10 Bronco menggantikan P-51 di Skadron Udara 3.....	34
Gambar 2.9 Pesawat OV-10 melakukan formasi di Udara	35
Gambar 2.10 Pesawat F-5 E Indonesia	37
Gambar 2.11 Pesawat F-5 F Indonesia	38
Gambar 2.12 Pesawat A-4 Skyhawk Indonesia	42
Gambar 2.13 Pesawat Hawk Mk-53 Indonesia terbang di atas Lanud Iswahjudi	45
Gambar 2.14 Pesawat F-16 Fighting Falcon Indonesia di Lanud Iswahjudi	49
Gambar 2.15 Menteri Pertahanan Jenderal A.H. Nasution dan para pejabat menginspeksi pesawat C-130.....	67
Gambar 3.1 Kegiatan Upgrading Pesawat F-5 pada proyek Macan	85

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data Anggaran Pertahanan 1969-1992.....	54
Tabel 2.2 Data Pengadaan Pesawat Tempur Indonesia 1970-1992.....	57
Tabel 2.3 Penempatan Skadron dan Home Base Pesawat Tempur Indonesia Tahun 1970-1992	58
Tabel 3.1 Data Nama Penerbang AURI yang Mengikuti Pelatihan ke Luar Negeri dalam Program Pengadaan Pesawat Tempur	94



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Amanat Presiden Republik Indonesia pada peringatan Hari Penerbangan Nasional 8 April 1970	115
Lampiran 2 Instruksi MENHANKAM/PANGAB Nomor: INS/35/X/1974.....	117
Lampiran 3 Keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Nomor: Kep/12/VII/1983	121
Lampiran 4 Keputusan KSAU Nomor: Kep/03/I/1985	124
Lampiran 5 Keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Nomor: Kep/62/IX/1985	127
Lampiran 6 Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1969/1970.....	130
Lampiran 7 Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1970/1971.....	131
Lampiran 8 Nota Keuangan Dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1971/1972.....	132
Lampiran 9 Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1972/1973.....	133
Lampiran 10 Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1973/1974.....	134
Lampiran 11 Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1974/1975.....	135
Lampiran 12 Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1975/1976.....	136
Lampiran 13 Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1976/1977.....	137
Lampiran 14 Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1977/1978.....	138
Lampiran 15 Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1978/1979.....	139
Lampiran 16 Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1979/1980.....	140
Lampiran 17 Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1980/1981.....	141

Lampiran 18 Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1981/1982.....	142
Lampiran 19 Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1982/1983.....	143
Lampiran 20 Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1983/1984.....	144
Lampiran 21 Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1984/1985.....	145
Lampiran 22 Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1985/1986.....	146
Lampiran 23 Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1986/1987.....	147
Lampiran 24 Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1987/1988.....	148
Lampiran 25 Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1988/1989.....	149
Lampiran 26 Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1989/1990.....	150
Lampiran 27 Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1990/1991.....	151
Lampiran 28 Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1991/1992.....	152
Lampiran 29 Keputusan MENHANKAM/PANGAB Nomor: KEP/B/01/I/1973	153
Lampiran 30 Keputusan MENHANKAM/PANGAB Nomor: KEP/B/01a/I/1973	160
Lampiran 31 Surat Keputusan Panglima ABRI Nomor: Skep/457/VII/1990	163
Lampiran 32 Keputusan MENHANKAM/PANGAB Nomor: KEP/E/210/1969	166
Lampiran 33 Keputusan MENHANKAM/PANGAB Nomor: KEP/B/77/I/1970.....	169
Lampiran 34 Keputusan MENHANKAM/PANGAB Nomor: KEP/E/49/II/1970	172